



Gubernur Tak Bisa Intervensi

Pengesahan APBD Melawi Kewenangan Pemda-DPRD

PONTIANAK - Pengesahan APBD Kabupaten Melawi terancam batal. Meski demikian, sebagai pembina, Gubernur Kalbar Sutarmidji tidak bisa campur tangan, cukup hanya mendampingi secara menyeluruh. Itu karena pengesa-

han APBD merupakan hak jajaran pemerintah daerah setempat.

"Pengesahan APBD merupakan kewenangan Pemerintah Daerah masing-masing beserta DPRD," jelas Suriansyah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, kepada

Pontianak Post baru-baru ini.

Menurutnya pada era Otonomi Daerah (Otda) seperti saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam hal ini Gubernur Kalbar, memang mempunyai hak melakukan pembinaan kepada 14 kabu-

paten/kota.

"Akan tetapi dalam hal pengesahan APBD, harus ditempuh dengan Peraturan Mendagri Nomor 33 Tahun 2018 dan Nomor 38 tahun 2019," ujarnya.

Dia menambahkan bahwa me-

nyelesaikan masalah di Kabupaten Melawi tersebut, Gubernur Kalbar hanya bisa melakukan asistensi penyusunan dan koordinasi termasuk proses komunikasi lebih lanjut.

◆ Ke Halaman 7 kolom 1



Gubernur Tak Bisa Intervensi

Sambungan dari halaman 1

"Termasuk juga dengan jajaran DPRD Kabupaten Melawi," ucapnya.

Hanya apabila upaya tersebut tidak membuahkan hasil, sesuai instruksi Mendagri, Bupati Melawi bisa mengajukan bantuan atau berkonsultasi ke Kemendagri di Jakarta. Namun upaya ini juga tetap harus melalui persetujuan Gubernur Kalbar sebagai perpanjangan tangan Mendagri di daerah. "Hanya itu yang bisa dilakukan," ucapnya.

Sementara itu Forum Mahasiswa Kabupaten Melawi (FMKM) meminta pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Melawi segera menuntaskan rancangan APBD Melawi. Kalep Elevensi, salah satu anggota menyebutkan bahwa lembaga eksekutif dan legislatif di Kabupaten Melawi sedang mempertontonkan drama dalam membahas APBD 2019. "Tidak boleh lagi terjadi hal-hal seperti ini. Cukup kita disuguhkan drama memuakkan ini," ujarnya berapi-api.

Terkait molornya pembahasan APBD, Kalep berpendapat bahwa hal itu jelas merugikan masyarakat. Bahkan, persoalan tersebut ditakutkan dapat mengakibatkan hilangnya hak otonomi Kabupaten Melawi sebagai daerah hasil pemekaran.

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji sebelumnya telah mengeluarkan surat teguran kepada Bupati dan DPRD Melawi agar segera menyelesaikan pembahasan APBD 2019. Sanksi teguran dan administratif mengancam Kabupaten Melawi, jika hingga batas akhir pembahasan Bupati dan DPRD gagal menyusun APBD.

Sanksi administratif yang akan diberikan Gubernur antara lain, tidak dibayarkannya hak-hak keuangan yang diatur dalam UU selama enam bulan, mengambil alih kewenangan perizinan, bahkan sampai penataan kembali daerah otonom (dalam hal ini menggabungkan kembali kabupaten pemekaran ke kabupaten induk, yakni Kabupaten Sintang).

Seperti diketahui, Melawi merupakan salah satu kabupaten yang termasuk ke dalam wilayah rencana pemekaran Provinsi Kapuas Raya. Jika dikembalikan ke kabupaten induk, FMKM menganggap hal itu akan berdampak buruk terhadap pemekaran Provinsi Kapuas Raya.

"Kami sangat menyayangkan apabila Kabupaten Melawi dikembalikan pada kabupaten induk dan itu tentunya berakibat pada pemekaran Provinsi Kapuas Raya," kata Dwi Supriyadi, salah satu anggota FMKM lainnya Dwi Supriyadi.

FMKM berharap suara mereka, yang juga merupakan masyarakat Kabupaten Melawi bisa didengarkan pihak terkait. Apalagi pemerintah pusat memberikan tenggat waktu penandatanganan APBD 2019 pada 30 November mendatang, alias tinggal beberapa hari lagi.

Mantan anggota DPRD Kalbar M Mohclis berharap masalah APBD Kabupaten Melawi tidak terus berlarut-larut. "Pemprov sebagai

perpanjangan tangan pemerintah pusat diharapkan bisa membantu menyelesaikan carut-marut APBD di Kabupaten Melawi. Jika persoalan ini tidak diselesaikan akan banyak implikasi muncul karena pembahasan APBD terlambat," ujarnya.

Salah satu akibat yang akan dirasakan masyarakat Melawi, yakni ancaman *disclaimer* dari BPK RI perwakilan Kalbar akan diterima pemerintah daerah. Di sisi lain, ancaman pemotongan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat kepada Kabupaten Melawi juga bakal terjadi.

"Ada juga dari proyek-proyek strategis dan vital bagi masyarakat juga tidak dapat dikerjakan. Sebagai contoh ancaman pembatalan pembangunan Jembatan Melawi Dua, Jembatan Kotabaru, dan Jembatan Belimbing menguat. Padahal jembatan ini sangat vital bagi masyarakat untuk membuka akses perekonomian masyarakat," ucap dia. (*den*)